**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

**1. Deskripsi Data Umum**

**a. Sejarah KPP Pratama Temanggung**

Tugas DJP sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/ PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam mengemban tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang perpajakan.

2. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan.

3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan.

4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan.

5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan.

6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat dan unit kantor operasional. Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, direktorat, dan jabatan tenaga pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP). Organisasi DJP, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai lebih dari 32.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, merupakan salah satu organisasi besar yang ada dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin berat.

1. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan

2. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Jumlah Kanwil DJP sebanyak 33 unit. Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. Unit ini dapat dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

1. KPP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar nasional;

2. KPP Madya, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa; dan

3. KPP Pratama, menangani wajib pajak lokasi. Jumlah KPP Wajib Pajak Besar sebanyak 4 unit, KPP Madya 19 unit, dan KPP Pratama sebanyak 309 unit. Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh KPP maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan dilaksanakan oleh unit KP2KP. Jumlah KP2KP sebanyak 207 unit.

**b. Visi-Misi KPP Pratama Kudus**

1. Visi KPP Pratama Kudus

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

2. Misi KPP Pratama Kudus

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

a. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;

b. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;

c. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan

d. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

**c. Pembagian Tugas Pokok di KPP Pratama Kudus**

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jendral melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan DJP.

2. Direktorat Peraturan Perpajakan I

Direktorat Peraturan Perpajakan I merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN dan PPnBM, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan PBB dan BPHTB.

3. Direktorat Peraturan Perpajakan I

Direktorat Peraturan Perpajakan I merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan PPh, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.

4. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan.

5. Direktorat Penegakan Hukum

Direktorat Penegakan Hukum merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penegakan hukum perpajakan.

6. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.

7. Direktorat Keberatan dan Banding

Direktorat Keberatan dan Banding merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keberatan dan banding.

8. Direktorat Potensi, Kepatuhan & Penerimaan Perpajakan

Direktorat Potensi, Kepatuhan & Penerimaan Perpajakan merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.

9. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat.

10. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan

Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.

11. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.

12. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi

Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.

13. Direktorat Transformasi Proses Bisnis.

Direktorat Transfornasi Proses Bisnis merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.

14. Direktorat Perpajakan Internasional

Direktorat Perpajakan Internasional merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan internasional.

15. Direktorat Intelijen Perpajakan

Direktorat Intelijen Perpajakan merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen perpajakan.

16. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi & Intensifikasi Pajak

Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi Intensifikasi mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

a. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan & Penegakan Hukum Perpajakan

Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

b. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan & Penertiban Sumber Daya Manusia.

Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

c. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian. Tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat.

**2. Deskripsi Data Khusus**

Dalam penelitian ini kuesioner disebarkan kepada 98 wajib pajak orang pribadi yang sedang melakukan pembayaran atau pelaporan pajak, serta sedang melakukan konsultasi pembayaran pajak di KPP Pratama Kudus untuk tahun pajak 2018 (tahun 2019). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan insidental sampling sehingga tidak membarikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh variabel dependen, maka akan disajikan deskripsi data dari setiap variabel dependen, maka akan disajikan deskripsi data dari setiap varibel berdasarkan data yang diperoleh dilapangan. Berikut adalah hasil analisis statistik deskriptif dari variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, religiutas wajib pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

1. **Deskripsi Angket**

Hasil dari masing-masing jawaban responden tentang variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, religiutas wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kudus sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Hasil dari jawaban responden**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Item** | **Total STS** | **%** | **Total TS** | **%** | **Total N** | **%** | **Total SS** | **%** | **Total STS** | **%** |
| Kesadaran Wajib Pajak (X1) | P1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 24 | 24,5 | 73 | 74,5 |
| P2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,1 | 67 | 68,4 | 28 | 28,6 |
| P3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 19 | 19,4 | 78 | 79,6 |
| P4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44,9 | 54 | 55,1 |
| P5 | 3 | 3,1 | 3 | 3,1 | 29 | 29,6 | 47 | 48,0 | 16 | 16,3 |
| Pelayanan Perpajakan (X2) | P1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,1 | 16 | 16,3 | 77 | 78,6 |
| P2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,1 | 37 | 37,8 | 56 | 57,1 |
| P3 | 5 | 5,1 | 2 | 2,0 | 29 | 29,6 | 41 | 41,8 | 21 | 21,4 |
| P4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23,5 | 41 | 41,8 | 34 | 34,7 |
| P5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,2 | 48 | 49,0 | 42 | 42,9 |
| P6 | 0 | 0 | 5 | 5,1 | 23 | 23,5 | 46 | 46,9 | 24 | 24,5 |
| P7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12,2 | 22 | 22,4 | 64 | 65,3 |
| P8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,1 | 17 | 17,3 | 75 | 76,5 |
| P9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,1 | 41 | 41,8 | 52 | 53,1 |
| religiutas wajib pajak  (X3) | P1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11,2 | 26 | 26,5 | 61 | 62,2 |
| P2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,1 | 20 | 20,4 | 72 | 73,5 |
| P3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9,2 | 41 | 41,8 | 48 | 49,0 |
| P4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,1 | 24 | 24,5 | 68 | 69,4 |
| P5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,2 | 64 | 65,3 | 24 | 24,5 |
| P6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13,3 | 59 | 60,2 | 26 | 26,5 |
| Kepatuhan Wajib Pajak  (Y) | P1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,1 | 24 | 24,5 | 67 | 68,4 |
| P2 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 44 | 44,9 | 53 | 54,1 |
| P3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,1 | 22 | 22,4 | 71 | 72,4 |
| P4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11,2 | 67 | 68,4 | 20 | 20,4 |
| P5 | 0 | 0 | 20 | 20,4 | 44 | 44,9 | 19 | 19,4 | 15 | 15,3 |
| P6 | 0 | 0 | 9 | 9,2 | 30 | 30,6 | 32 | 32,7 | 27 | 27,6 |
| P7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13,3 | 44 | 44,9 | 41 | 41,8 |
| P8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,2 | 49 | 50,0 | 39 | 39,8 |

Sumber: data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan keterangan pada tabel di atas dapat diketahui jawaban responden tentang variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, religiutas wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kudus. Data-data tersebut dijelaskan di bawah ini :

1. **Kesadaran Wajib Pajak**

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dipahami bahwa: pada **item 1** yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang, tidak setuju sebanyak 0 orang, netral 1 orang, setuju 24 orang dan sangat setuju 73 orang. Jadi dapat disimpulkan mayoritas responden sangat setuju bahwa Kesadaran Wajib Pajak yang diterapkan pada KPP Pratama Kudus sangatlah cocok.

Pada **item 2**, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang, tidak setuju sebanyak 0 orang, netral 3 orang, setuju 67 orang dan sangat setuju 28 orang. Jadi dapat disimpulkan mayoritas responden setuju bahwa Kesadaran Wajib Pajak yang diterapkan pada KPP Pratama Kudus sangatlah cocok.

Pada **item 3**, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang, tidak setuju sebanyak 0 orang, netral 1 orang, setuju 19 orang dan sangat setuju 78 orang. Jadi dapat disimpulkan mayoritas responden sangat setuju bahwa Kesadaran Wajib Pajak yang diterapkan pada KPP Pratama Kudus sangatlah cocok.

Pada **item 4,** yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang, tidak setuju sebanyak 0 orang, netral 0 orang, setuju 44 orang dan sangat setuju 54 orang. Jadi dapat disimpulkan mayoritas responden sangat setuju bahwa Kesadaran Wajib Pajak yang diterapkan pada KPP Pratama Kudus sangatlah cocok.

Pada **item 5,** yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3 orang, tidak setuju sebanyak 3 orang, netral 29 orang, setuju 47 orang dan sangat setuju 16 orang. Jadi dapat disimpulkan mayoritas responden setuju bahwa Kesadaran Wajib Pajak yang diterapkan pada KPP Pratama Kudus sangatlah cocok.

1. **Variabel Pelayanan Perpajakan**

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dipahami bahwa: pada **item 1** yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang, tidak setuju sebanyak 0 orang, netral 5 orang, setuju 16 orang dan sangat setuju 77 orang. Jadi dapat disimpulkan mayoritas responden sangat setuju bahwa Pelayanan Perpajakan yang diterapkan pada KPP Pratama Kudus sangatlah cocok.

Pada **item 2**, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang, tidak setuju sebanyak 0 orang, netral 5 orang, setuju 37 orang dan sangat setuju 56 orang. Jadi dapat disimpulkan mayoritas responden sangat setuju bahwa Pelayanan Perpajakan yang diterapkan pada KPP Pratama Kudus sangatlah cocok.

Pada **item 3**, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 5 orang, tidak setuju sebanyak 2 orang, netral 29 orang, setuju 41 orang dan sangat setuju 21 orang. Jadi dapat disimpulkan mayoritas responden setuju bahwa Pelayanan Perpajakan yang diterapkan pada KPP Pratama Kudus sangatlah cocok.

Pada **item 4**, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang, tidak setuju sebanyak 0 orang, netral 23 orang, setuju 41 orang dan sangat setuju 34 orang. Jadi dapat disimpulkan mayoritas responden setuju bahwa Pelayanan Perpajakan yang diterapkan pada KPP Pratama Kudus sangatlah cocok.

Pada **item 5**, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang, tidak setuju sebanyak 0 orang, netral 8 orang, setuju 48 orang dan sangat setuju 42 orang. Jadi dapat disimpulkan mayoritas responden setuju bahwa Pelayanan Perpajakan yang diterapkan pada KPP Pratama Kudus sangatlah cocok.

Pada **item 6**, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang, tidak setuju sebanyak 5 orang, netral 23 orang, setuju 46 orang dan sangat setuju 24 orang. Jadi dapat disimpulkan mayoritas responden sangat setuju bahwa Pelayanan Perpajakan yang diterapkan pada KPP Pratama Kudus sangatlah cocok.

Pada **item 7**, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang, tidak setuju sebanyak 0 orang, netral 12 orang, setuju 22 orang dan sangat setuju 64 orang. Jadi dapat disimpulkan mayoritas responden sangat setuju bahwa Pelayanan Perpajakan yang diterapkan pada KPP Pratama Kudus sangatlah cocok.

Pada **item 8**, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang, tidak setuju sebanyak 0 orang, netral 6 orang, setuju 17 orang dan sangat setuju 65 orang. Jadi dapat disimpulkan mayoritas responden sangat setuju bahwa Pelayanan Perpajakan yang diterapkan pada KPP Pratama Kudus sangatlah cocok.

Pada **item 9**, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang, tidak setuju sebanyak 0 orang, netral 5 orang, setuju 41 orang dan sangat setuju 52 orang. Jadi dapat disimpulkan mayoritas responden sangat setuju bahwa Pelayanan Perpajakan yang diterapkan pada KPP Pratama Kudus sangatlah cocok.

1. **Variabel religiutas wajib pajak**

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dipahami bahwa: pada **item 1** yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang, tidak setuju sebanyak 0 orang, netral 11 orang, setuju 26 orang dan sangat setuju 61 orang. Jadi dapat disimpulkan mayoritas responden sangat setuju bahwa religiutas wajib pajak yang diterapkan pada KPP Pratama Kudus sangatlah cocok.

Pada **item 2**, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang, tidak setuju sebanyak 0 orang, netral 6 orang, setuju 20 orang dan sangat setuju 72 orang. Jadi dapat disimpulkan mayoritas responden sangat setuju bahwa religiutas wajib pajak yang diterapkan pada KPP Pratama Kudus sangatlah cocok.

Pada **item 3**, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang, tidak setuju sebanyak 0 orang, netral 9 orang, setuju 41 orang dan sangat setuju 48 orang. Jadi dapat disimpulkan mayoritas responden sangat setuju bahwa religiutas wajib pajak yang diterapkan pada KPP Pratama Kudus sangatlah cocok.

Pada **item 4**, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang, tidak setuju sebanyak 0 orang, netral 6 orang, setuju 24 orang dan sangat setuju 68 orang. Jadi dapat disimpulkan mayoritas responden sangat setuju bahwa religiutas wajib pajak yang diterapkan pada KPP Pratama Kudus sangatlah cocok.

Pada **item 5**, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang, tidak setuju sebanyak 0 orang, netral 10 orang, setuju 64 orang dan sangat setuju 24 orang. Jadi dapat disimpulkan mayoritas responden setuju bahwa religiutas wajib pajak yang diterapkan pada KPP Pratama Kudus sangatlah cocok.

Pada **item 6**, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang, tidak setuju sebanyak 0 orang, netral 13 orang, setuju 59 orang dan sangat setuju 26 orang. Jadi dapat disimpulkan mayoritas responden setuju bahwa religiutas wajib pajak yang diterapkan pada KPP Pratama Kudus sangatlah cocok.

1. **Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan data tabel di atas dapat dipahami bahwa: pada **item 1**, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang, tidak setuju sebanyak 0 orang, netral 7 orang, setuju 24 orang dan sangat setuju 67 orang. Jadi dapat disimpulkan mayoritas responden sangat setuju bahwa Kepatuhan Wajib Pajak yang diterapkan pada KPP Pratama Kudus sangatlah cocok.

Pada **item 2**, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang, tidak setuju sebanyak 1 orang, netral 0 orang, setuju 44 orang dan sangat setuju 53 orang. Jadi dapat disimpulkan mayoritas responden sangat setuju bahwa Kepatuhan Wajib Pajak yang diterapkan pada KPP Pratama Kudus sangatlah cocok.

Pada **item 3**, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang, tidak setuju sebanyak 0 orang, netral 5 orang, setuju 22 orang dan sangat setuju 71 orang. Jadi dapat disimpulkan mayoritas responden sangat setuju bahwa Kepatuhan Wajib Pajak yang diterapkan pada KPP Pratama Kudus sangatlah cocok.

Pada **item 4**, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang, tidak setuju sebanyak 0 orang, netral 11 orang, setuju 67 orang dan sangat setuju 20 orang. Jadi dapat disimpulkan mayoritas responden setuju bahwa Kepatuhan Wajib Pajak yang diterapkan pada KPP Pratama Kudus sangatlah cocok.

Pada **item 5**, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang, tidak setuju sebanyak 20 orang, netral 44 orang, setuju 19 orang dan sangat setuju 15 orang. Jadi dapat disimpulkan mayoritas responden setuju bahwa Kepatuhan Wajib Pajak yang diterapkan pada KPP Pratama Kudus sangatlah cocok.

Pada **item 6**, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang, tidak setuju sebanyak 9 orang, netral 30 orang, setuju 32 orang dan sangat setuju 27 orang. Jadi dapat disimpulkan mayoritas responden setuju bahwa Kepatuhan Wajib Pajak yang diterapkan pada KPP Pratama Kudus sangatlah cocok.

Pada **item 7**, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang, tidak setuju sebanyak 0 orang, netral 13 orang, setuju 44 orang dan sangat setuju 41 orang. Jadi dapat disimpulkan mayoritas responden setuju bahwa Kepatuhan Wajib Pajak yang diterapkan pada KPP Pratama Kudus sangatlah cocok.

Pada **item 8**, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 orang, tidak setuju sebanyak 0 orang, netral 10 orang, setuju 49 orang dan sangat setuju 39 orang. Jadi dapat disimpulkan mayoritas responden sangat setuju bahwa Kepatuhan Wajib Pajak yang diterapkan pada KPP Pratama Kudus sangatlah cocok.

**B. Analisis Data**

**1. Uji Prasyarat**

**a. Uji Validitas**

Kriteria yang digunakan untuk mengetahui bahwa suatu pernyataan itu dinyatakan valid atau tidak valid yaitu jika 𝑟𝑥𝑦 ≥ 0,197 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila 𝑟𝑥𝑦 < 0,197 maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid. [[1]](#footnote-1) Uji coba validitas instrumen yang dilakukan kepada 98 responden didapatkan hasil seperti pada tabel dibawah ini.

1. Uji Validitas Instrumen Variabel Perubahan Tarif Pajak

# Tabel 4.2

# Hasil Uji Validitas Instrumen Perubahan Tarif Pajak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Butir Pernyataan** | **Corrected Item- Total Correlation** | **Standar Nilai**  ***Correlation*** | **Keterangan** |
| Butir 1 | 0, 847 | 0,197 | Valid |
| Butir 2 | 0,767 | 0,197 | Valid |
| Butir 3 | 0,715 | 0,197 | Valid |
| Butir 4 | 0,618 | 0,197 | Valid |
| Butir 5 | 0,893 | 0,197 | Valid |

Dari nilai *pearson correlation* variabel Perubahan Tarif Pajak Dinyatakan valid karena nilai korelasinya > 0,197 sehingga butir pernyataan digunakan dalam penelitian.[[2]](#footnote-2)

1. Uji Validitas Instrumen Variabel Pelayanan Petugas Pajak

# Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Pelayanan Petugas Pajak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Butir Pernyataan** | **Corrected Item- Total Correlation** | **Standar Nilai**  ***Correlation*** | **Keterangan** |
| Butir 1 | 0,827 | 0,197 | Valid |
| Butir 2 | 0,975 | 0,197 | Valid |
| Butir 3 | 1,130 | 0,197 | Valid |
| Butir 4 | 1,039 | 0,197 | Valid |
| Butir 5 | 0,983 | 0,197 | Valid |
| Butir 6 | 1,053 | 0,197 | Valid |
| Butir 7 | 0,833 | 0,197 |  |
| Butir 8 | 0,827 | 0,197 |  |
| Butir 9 | 0,975 | 0,197 |  |

Dari nilai *pearson correlation* variabel Pelayanan Petugas Pajak Dinyatakan valid karena nilai korelasinya > 0,197 sehingga butir pernyataan digunakan dalam penelitian.[[3]](#footnote-3)

1. Uji Validitas Instrumen Variabel Religius Wajib Pajak

# Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Instrumen Religius Wajib Pajak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Butir Pernyataan** | **Butir Pernyataan** | **Standar Nilai**  ***Correlation*** | **Keterangan** |
| Butir 1 | 0,823 | 0,197 | Valid |
| Butir 2 | 0,885 | 0,197 | Valid |
| Butir 3 | 0,968 | 0,197 | Valid |
| Butir 4 | 1,035 | 0,197 | Valid |
| Butir 5 | 1,143 | 0,197 | Valid |
| Butir 6 | 0,965 | 0,197 | Valid |

Dari nilai *pearson correlation* variabel Religius Wajib Pajak Dinyatakan valid karena nilai korelasinya > 0,197 sehingga butir pernyataan digunakan dalam penelitian.[[4]](#footnote-4)

1. Uji Validitas Instrumen Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

# Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Butir Pernyataan** | **Butir Pernyataan** | **Standar Nilai**  ***Correlation*** | **Keterangan** |
| Butir 1 | 0,854 | 0,197 | Valid |
| Butir 2 | 0,806 | 0,197 | Valid |
| Butir 3 | 0,787 | 0,197 | Valid |
| Butir 4 | 0,812 | 0,197 | Valid |
| Butir 5 | 0,853 | 0,197 | Valid |
| Butir 6 | 0,791 | 0,197 | Valid |
| Butir 7 | 0,888 | 0,197 | Valid |
| Butir 8 | 0,666 | 0,197 | Valid |

Dari nilai *pearson correlation* variabel Kepatuhan Wajib Pajak, butir pernyataan yang harus digugurkan karena tidak valid tidak ada dan dinyatakan valid semua. Karena nilai korelasinya > 0,197 sehingga butir pernyataan dapat digunakan dalam penelitian.[[5]](#footnote-5)

**b. Uji Reliabiltas**

Apabila nilai r lebih dari 0,60 maka instrumen tersebut dikatakan reliabel. Namun sebaliknya, apabila kurang dari 0,60 maka instrumen tersebut tidak reliabel. Uji coba reliabilitas dihitung dengan menggunakan koefisien Alpha, dimana akan reliabel jika memenuhi nilai Alpha Cronbach’s > 0,60.[[6]](#footnote-6) Hasil uji coba reliabilitas instrumen dirangkum pada tabel dibawah ini.

# Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Variabel** | **Nilai *Alpha*** | **Keterangan** |
| 1 | Perubahan Tarif | 0, 749 | Reliabel |
| 2 | Pelayanan Petugas | 0, 882 | Reliabel |
| 3 | Religius Wajib Pajak | 0, 775 | Reliabel |
| 4 | Kepatuhan Wajib Pajak | 0,785 | Reliabel |

1. **Uji Asumsi Klasik**

Untuk mengetahui apakah suatu data dapat dianalisa lebih lanjut diperlukan suatu uji asumsi klasik agar hasil dan analisa nantinya efisien dan tidak bias. Adapun kriteria pengujian tersebut sebagaiberikut :

1. **Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Suatu regresi dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai *tolerance* kurang dari sama dengan 0,01 atau sama dengan nilai VIF diatas 10.[[7]](#footnote-7) Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah dengan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) sebagai berikut:

**Tabel 4.7**

**Hasil Uji Multikolinieritas dengan Koefisien**

| **Coefficientsa** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Correlations | | | Collinearity Statistics | |
| B | Std. Error | Beta | Zero-order | Partial | Part | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 9.978 | 1.077 |  | 9.264 | .000 |  |  |  |  |  |
| Perubahan Tarif | .639 | .056 | .691 | 11.403 | .000 | .751 | .762 | .665 | .927 | 1.078 |
| Pelayan Petugas | .110 | .024 | .272 | 4.648 | .000 | .246 | .432 | .271 | .995 | 1.005 |
| Religiuitas Wajib Pajak | .149 | .038 | .236 | 3.883 | .000 | .403 | .372 | .226 | .923 | 1.084 |

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas yang telah dilakukan diketahui bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel perubahan tarif, pelayanan petugas, dan religiuitas wajib pajak sebesar (0,927/ 0,995/ 0,923 ), dan nilai VIF masing-masing variabel variabel perubahan tarif, pelayanan petugas, dan religiuitas wajib pajak sebesar (1,078/ 1,005/ 1,084). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki *tolerance* kurang dari 0,10 dan tidak ada variabel bebas yang memiliki VIF lebih besar dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

1. **Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan yang lain pada model regresi. Jika terjadi korelasi maka terdapat problem autokorelasi. Model pengujian menggunakan uji Durbin-Watson (uji DW).[[8]](#footnote-8) Hasil pengujian uji autokorelasi dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.7**

**Hasil Uji Autokolerasi**

| **Model Summaryb** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics | | | | | Durbin-Watson |
| R Square Change | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change |
| 1 | .825a | .680 | .670 | 1.452 | .680 | 66.649 | 3 | 94 | .000 | 2.139 |

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

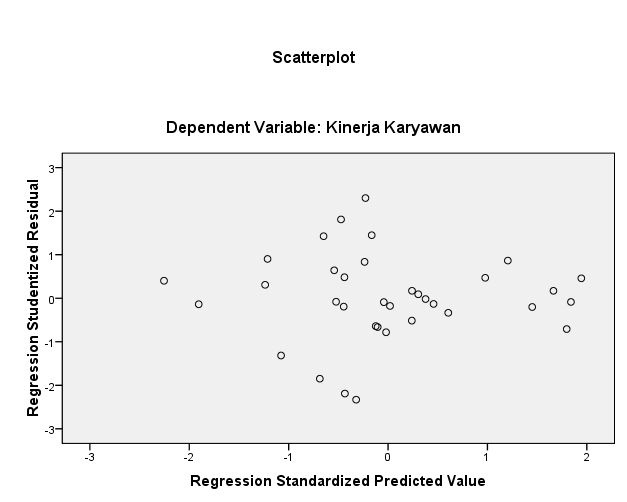
Dari hasil uji autokorelasi tabel di atas, diketahui nilai *Durbin-Watson* yang dihasilkan dari model regresi adalah 2,139. Sedangkan dari tabel *Durbin-Watson* dengan signifikansi 0,05 dan jumlah (n) = 98 dan k = 2 di peroleh nilai dL sebesar 0,680 , dU sebesar 1,563 dan 4-dU = 2,861, maka dU < DW < 4-dU atau 0,680 < 1,563 < 2,861 , sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

1. **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual satu ke pengamat yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas.[[9]](#footnote-9) Pengujian uji heteroskedastisitas dapat disajikan sebagai berikut:

**Gambar 4.1**

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber : Data primer yang diolah, 2019

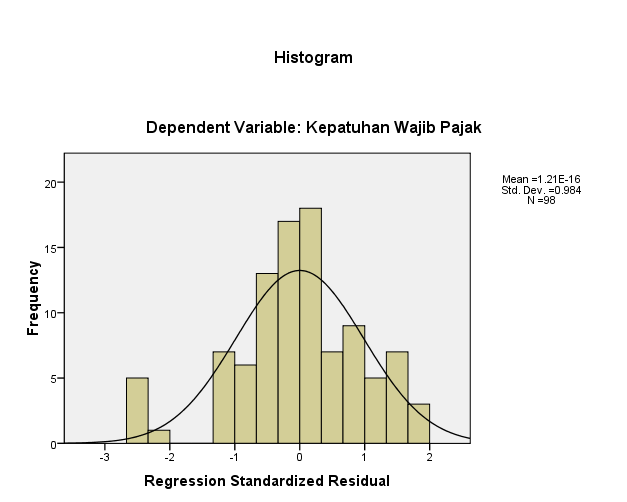
Dari grafik *scatterplot* dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas dan tersebar secara acak, dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi yang dihasilkan tidak mengandung heteroskedastisitas.

1. **Uji** **Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk mengkaji data variabel bebas (X) dan data variabel (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, yaitu berdistribusi normal dan berdistribusi tidak normal. Cara yang bisa ditempuh untuk menguji kenormalan data adalah dengan menggunakan histogram dengan bentuk histogram yang hampir sama dengan bentuk distribusi normal atau menggunakan Grafik Normal *P-P Plot* dengan cara melihat penyebaran datanya.[[10]](#footnote-10) Adapun uji normalitas dalam penelitian ini disajikan pada grafik sebagai berikut:

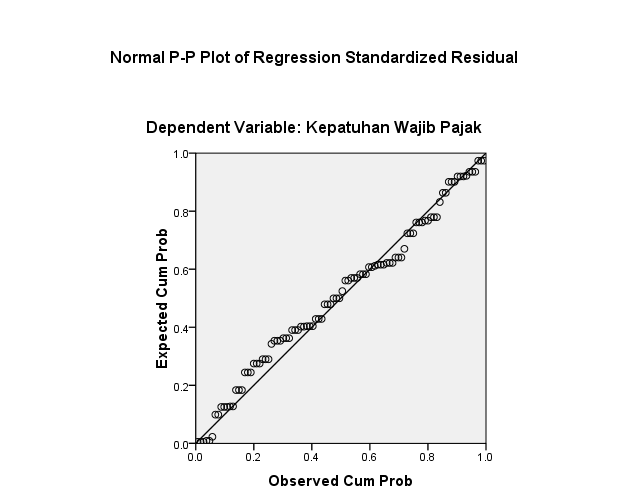
**Gambar 4.2**

**Hasil Uji Normalitas dengan Histogram**



**Gambar 4.3**

**Hasil Uji Normalitas dengan *Normal Probability Plot***



Sumber: data primer yang diolah 2019

Untuk melihat apakah data terdistribusi normal atau tidak, kita dapat melihat pada grafik histogram. Dari grafik histogram pada gambar , residual data telah menunjukkan kurva normal yang membentuk lonceng sempurna. Selain dengan menggunakan histogram, kita juga bisa melihat uji normalitas dengan menggunakan grafik normal *P-P Plot* berdasarkan gambardi atas, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, data yang digunakan telah memenuhi asumsi klasik dan dapat dikatakan data terdistribusi normal.

1. **Analisis Data**
2. **Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji sejauhmana pengaruh antara variabel independen yaitu variabel perubahan tarif, pelayanan petugas, dan religiuitas wajib pajak dengan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus. Dengan menggunakan alat bantu statistik SPSS *for windows* versi 16.0 diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 4.8**

**Hasil Analisis Regresi Berganda**

| **Coefficientsa** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Correlations | | | Collinearity Statistics | |
| B | Std. Error | Beta | Zero-order | Partial | Part | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 9.978 | 1.077 |  | 9.264 | .000 |  |  |  |  |  |
| Perubahan Tarif | .639 | .056 | .691 | 11.403 | .000 | .751 | .762 | .665 | .927 | 1.078 |
| Pelayan Petugas | .110 | .024 | .272 | 4.648 | .000 | .246 | .432 | .271 | .995 | 1.005 |
| Religiuitas Wajib Pajak | .149 | .038 | .236 | 3.883 | .000 | .403 | .372 | .226 | .923 | 1.084 |

Sumber: data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel di atas diperoleh koefisien untuk variabel bebas X1= 0,639, X2=0,110;X3= 0,149 dan konstanta sebesar 9,978 sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah:

Y = a + b1X1 + b2X2 +b3X3

Y = 9,978 + 0,639X1+ 0,110X2 + 0,149X3

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1= perubahan tarif

X2 =pelayanan petugas

X3 = religiuitas wajib pajak

a = Nilai Intercept (konstanta)

b1 = Koefisien perubahan tarif dengan Kepatuhan Wajib Pajak

b2 = Koefisien regresi pelayanan petugas dengan Kepatuhan Wajib Pajak

b3 = Koefisien regresi religiuitas wajib pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

1. Konstanta sebesar 9,978, artinya jika perubahan tarif (X1) dan pelayanan petugas (X2), religiuitas wajib pajak (X3) nilainya adalah 0 (nol) , maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai 9,978. Koefisien regresi perubahan tarif (X1) dari perhitungan linier berganda didapat nilai *coefficient* (b1) = 0,639. Hal ini berarti setiap ada perubahan tarif (X1) maka kepatuhan wajib pajak (Y) juga akan meningkat dengan anggapan variabel pelayanan petugas (X2) dan variable religiuitas wajib pajak (X3)bernilai konstan.
2. Koefisien regresi pelayanan petugas (X2) dari perhitungan linier berganda didapat nilai *coefficient* (b2) = 0,110. Hal ini berarti setiap ada pelayanan petugas (X2) maka kepatuhan wajib pajak (Y) juga akan meningkat dengan anggapan variabel perubahan tarif (X1)dan religiutas wajib pajak bernilai konstan.
3. Koefisien regresi religius wajib pajak (X3) dari perhitungan linier berganda didapat nilai *coefficient* (b3) = 0,149. Hal ini berarti setiap ada perubahan tarif (X1), pelayanan petugas (X2) maka kepatuhan wajib pajak (Y) juga akan meningkat dengan anggapan variabel perubahan tarif (X1), pelayanan petugas (X2) bernilai konstan.
4. **Analisis Koefisien determinasi (R2)**

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan dari variabel bebas yang diteliti terhadap variasi variabel tergantung. Dari hasil perhitungan melalui alat ukur statistic SPSS 16.0 *for Windows* didapatkan nilai koefisien determinasi sebagai berikut :

**Tabel 4.9**

**Hasil koefisien determinasi**

| **Model Summaryb** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics | | | | | Durbin-Watson |
| R Square Change | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change |
| 1 | .825a | .680 | .670 | 1.452 | .680 | 66.649 | 3 | 94 | .000 | 2.139 |

Sumber:data primer yang diolah, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi yang dinotasikan dalam angka *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,670 ini artinya bahwa sumbangan pengaruh variabel perubahan tarif (X1), pelayanan petugas (X2) dan relegius wajib pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dipengaruhi sebesar 67%. Jadi besarnya pengaruh antara perubahan tarif, pelayanan petugas dan relegius wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 67 %. Sedangkan sisanya 33% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

# Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan (Uji F) digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan dari variabel bebas yang diteliti terhadap variasi variabel tergantung. Dari hasil perhitungan melalui alat ukur statistic SPSS 16.0 *for Windows* didapatkan nilai koefisien determinasi sebagai berikut :

**Tabel 4.10**

**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

| **Model Summaryb** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics | | | | |
| R Square Change | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change |
| 1 | .825a | .680 | .670 | 1.452 | .680 | 66.649 | 3 | 94 | .000 |

Sumber:data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.10 secara simultan pada taraf signifikansi 5% diperoleh nilai F yang ditunjukkan pada tabel 4.10 sebesar 66,649 dengan signifikansi 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai *sig.* F yang dihasilkan kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa secara simultan variabel perubahan tarif (X1), pelayanan petugas (X2) dan relegius wajib pajak (X3) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Angka koefisien R menunjukkan nilai positif yaitu sebesar 0,680 yang berarti dapat diartikan pula bahwa simultan variabel perubahan tarif (X1), pelayanan petugas (X2) dan relegius wajib pajak (X3) memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa variabel perubahan tarif (X1), pelayanan petugas (X2) dan relegius wajib pajak (X3) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) terbukti dan hipotesis keempat diterima.

1. **Analisis Uji Parsial (Uji t)**

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X) secara parsial (individual) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Tabel distrbusi t dicari derajat pada derajat kebebasan (df) n-k-1. (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen). Sehingga t tabel diperoleh df = (35 – 2 – 1) dengan signifikansi 5% adalah 1,950. Apabila nilai thitung > nilai ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, sebaliknya apabila thitung < ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.10**

**Hasil Uji Parsial (Uji T)**

| **Coefficientsa** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Correlations | | | Collinearity Statistics | |
| B | Std. Error | Beta | Zero-order | Partial | Part | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 9.978 | 1.077 |  | 9.264 | .000 |  |  |  |  |  |
| Perubahan Tarif | .639 | .056 | .691 | 11.403 | .000 | .751 | .762 | .665 | .927 | 1.078 |
| Pelayan Petugas | .110 | .024 | .272 | 4.648 | .000 | .246 | .432 | .271 | .995 | 1.005 |
| Religiuitas Wajib Pajak | .149 | .038 | .236 | 3.883 | .000 | .403 | .372 | .226 | .923 | 1.084 |

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

1. Uji Hipotesis Variabel perubahan tarif

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa ttabel dalam penelitian ini untuk derajat kebebasan df (98–2–1) = 95 dengan signifikansi 5% adalah 1,950. Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh untuk perubahan tarifdiperoleh thitung = 11,403 dengan tingkat signifikasi 0,000 (kurang dari 0,05). Dengan demikian diperoleh thitung (11,403) > ttabel (1,950) sehingga menolak Ho dan Ha diterima. Dapat disimpukan bahwa hipotesis ini menyatakan bahwa perubahan tarif berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus.

1. Uji Hipotesis Variabel pelayanan petugas

Berdasarkan hasil pengujian variabel kelompok acuan diperoleh thitung = 4,648 dengan tingkat signifikasi 0,000 (kurang dari 0,05). Diperoleh ttabel dengan df (98 – 2 – 1) = 95 dengan signifikansi 5% adalah 1,950. Dengan demikian diperoleh thitung (4,648) > ttabel (1,950) sehingga menolak Ho dan Ha diterima. Dapat disimpukan bahwa hipotesis ini menyatakan pelayanan petugas secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus.

1. Uji Hipotesis Variabel relegius wajib pajak

Berdasarkan hasil pengujian variabel kelompok acuan diperoleh thitung = 3,883 dengan tingkat signifikasi 0,000 (kurang dari 0,05). Diperoleh ttabel dengan df (98 – 2 – 1) = 95 dengan signifikansi 5% adalah 1,950. Dengan demikian diperoleh thitung (3,883) > ttabel (1,950) sehingga menolak Ho dan Ha diterima. Dapat disimpukan bahwa hipotesis ini menyatakan relegius wajib pajak secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus.

**D. Pembahasan**

* 1. **Pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus**

Setelah dianalisis, hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini diterima dengan nilai koefisien regresi 0,639 dengan nilai hitung t 11,403, dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan antara perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus, terdapatnya pengaruh yang signifikan anatara perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh variabel perubahan tarif pajak yang melaporkan, membayarkan SPT Tahunan.

Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini berarti perubahan tarif pajak searah dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Perubahan tarif pajak merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Harjanti Puspa Ningrum pada tahun 2012, mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

* 1. **Pengaruh pelayanan petugas terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus**

Berdasarkan uji parsial, Pelayanan Pegawai Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, degan nilai koefisien regresi 0,110 dan nilai t hitungnya 4,468. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif yang berarti bahwa jika Pelayanan Pegawai Pajak meningkat maka Kepatuhan Wajb Pajak juga akan meningkat.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sri Tita Mutia (2014) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana semakin baik dan berkualitas pelayanan fiskus maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

Adanya pelayanan yang didukung dengan fasilitas-fasilitas seperti parkir yang luas dan tempat yang ber-AC, nomor antrian elektronik, formulir-formulir pajak, tersedianya bank dalam satu area KPP sehingga memudahkan wajib pajak membayar dan melaporkan SPT, dalm satu waktu, dukungan IT atau e-system. Dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut dapat dikatakan bahwa KPP Pratama temanggung telah memberikan pelayanan dengan baik, sehingga wajib pajak merasa puas dan akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

* 1. **Pengaruh religiutas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus**

Berdasarkan uji parsial, religiutas wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, degan nilai koefisien regresi 0,149 dan nilai t hitungnya 3,883. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif yang berarti bahwa jika religiutas wajib pajak meningkat maka Kepatuhan Wajb Pajak juga akan meningkat.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Agus Triono (2013) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif religiutas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana semakin baik dan berkualitas religiutas wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

Adanya faktor yang melatarbelakangi dalam membayar pajak antara lain adalah dari faktor internal dan eksternal. Dengan menanamkan rasa tanggungjawab akan membayar pajak sewaktu-waktu ketika jadwal membayar harus dilakukan. Kemudian lingkungan keluarga yang relegius mempengaruhi tanggung jawab ketika membayar pajak.

1. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* Alfabeta , Bandung, 2008, hlm. 179 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 179. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* Alfabeta , Bandung, 2008, hlm. 179 [↑](#footnote-ref-3)
4. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 179 [↑](#footnote-ref-4)
5. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* Alfabeta , Bandung, 2008, hlm. 179 [↑](#footnote-ref-5)
6. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm.239 [↑](#footnote-ref-6)
7. Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariati dengan Program SPSS,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, hlm. 92. [↑](#footnote-ref-7)
8. Duwi Priyatno, *Paham Analisis Data Dengan SPSS*, MediaKom, Yogyakarta, 2010, hlm. 87. [↑](#footnote-ref-8)
9. Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariati dengan Program SPSS*, 69. [↑](#footnote-ref-9)
10. Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariati dengan Program SPSS*, 77. [↑](#footnote-ref-10)